

Literasi Digital dan Masa Depan Industri Perbankan Indonesia.

Indonesia diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi global pada 2030. Generasi muda Indonesia akan menjadi fondasi dari salah satu kekuatan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Komitmen paket ketujuh ASEAN di bidang jasa keuangan yang diratifikasi oleh Indonesia pada 2020 melalui UU No. 13 Tahun 2020 akan memungkinkan negosiasi antar negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk memperluas dan mendirikan cabang perbankan mereka di kawasan ASEAN. Pengaturan ini akan mengarah pada liberalisasi industri perbankan dan mendorong perdagangan dan keamanan di Asia. Untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi ketertarikan dan investasi global dengan membangun industri perbankan yang mudah diakses, transparan, dan mengutamakan pemanfaatan teknologi yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola aset mereka.

Bayangkan sebuah bank Indonesia yang diakui secara global, modern dan dinamis lengkap dengan cabang usaha yang didirikan di setiap negara ASEAN pada tahun 2040. Liberalisasi sektor keuangan di antara negara-negara ASEAN telah menciptakan peluang untuk perkembangan keuangan yang kompetitif dengan negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura. Bank-bank ASEAN yang memenuhi syarat dalam protokol ini akan dapat masuk ke Indonesia dengan akses pasar yang tidak dibatasi dan tidak ada perlakuan diskriminatif oleh bank sentral lokal. Sebaliknya, bank-bank di Indonesia juga akan mampu melakukan ekspansi di wilayah ASEAN. Saat ini, sebagian besar kekuatan pemangku kepentingan dalam industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia dipegang oleh investor asing dengan lebih dari 90% saham bank. Dampak krisis keuangan Asia tahun 1997 masih terasa hingga saat ini karena nilai rupiah yang relatif rendah dibandingkan dengan kekuatan mata uang ASEAN lainnya. Namun, ada harapan kuat bahwa investasi asing dan dalam negeri akan lebih seimbang di masa depan seiring dengan kemajuan perekonomian Indonesia.

Oleh karena Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada pertengahan abad, ada peluang besar untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan masyarakat Indonesia dan mengelola kekayaan mereka. Skala aktivitas ekonomi keluarga muda berpenghasilan menengah dan sejahtera di Indonesia akan mencerminkan ledakan ekonomi yang terjadi di India baru-baru ini. Jika pemerintah Indonesia ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank-bank lokal melalui keamanan yang baik dan praktik yang transparan, pemerintah perlu membangun hubungan jangka panjang dengan perbankan. Orang Indonesia yang berkecukupan dan melek teknologi akan tertarik pada layanan perbankan yang memungkinkan akses dan transfer tanpa batas di seluruh kawasan ASEAN. Ketika keamanan dan permodalan domestik terjamin, negara-negara anggota ASEAN akan memiliki kepercayaan untuk membuka rekening di bank-bank besar Indonesia dan menjalankan bisnis secara efisien di mana saja di kawasan ini. Sektor keuangan Indonesia yang stabil akan menarik negara-negara anggota ASEAN untuk berinvestasi di pasar asuransi yang berkembang.

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia memang menarik perhatian, tetapi ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Literasi masyarakat tentang akses keuangan khususnya di bidang perbankan menjadi salah satu tantangan meskipun tingkat kerahasiaan masyarakat

Indonesia terhadap industri perbankan masih tinggi. Sayangnya, berdasarkan studi terbaru Transparansi Internasional Indonesia (TII), situasi korupsi di Indonesia memburuk. Selain itu, jika dikaitkan dengan praktik perbankan, pejabat bank dalam banyak kasus menggunakan aksesnya untuk melakukan tindak pidana korupsi di bidang perbankan, termasuk dengan penyalahgunaan dana tabungan pelanggan.

Penting untuk dicatat bahwa peraturan perbankan dalam negeri termasuk pengaturan yang paling ketat. Industri keuangan termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan industri keuangan non-bank lain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen. Negara-negara anggota ASEAN harus yakin bahwa perjanjian mereka akan dilaksanakan dengan itikad baik dan bahwa pemberian layanan keuangan dilindungi oleh peraturan yang ada. Peraturan perbankan digital yang ada saat ini dinilai kurang formal dan kurang praktis dibandingkan dengan kebijakan perbankan tradisional. Pengelolaan Protokol ASEAN akan bergantung pada ketatnya Kerangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN. Otoritas perbankan dan jasa keuangan Indonesia harus berkonsultasi dengan profesional industri perbankan untuk memperkuat peraturan hukum yang akan memastikan transaksi yang lancar dan aman. Bank Indonesia yang mampu memenuhi potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia harus bebas dari korupsi untuk meredakan kecemasan para investornya.

Indonesia perlu berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan profesional staf perbankan dan layanan keuangan di masa depan. Dari 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 60% merupakan usia produktif. Milenial sangat mahir dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Literasi digital akan menjadi dasar penyerapan dan keterlibatan pengelolaan uang di Indonesia. COVID-19 telah mengungkap perlunya teknologi informasi dan pengalaman virtual untuk terhubung dengan kolega dan maupun mitra kerja. Walaupun Covid-19 membatasi interaksi fisik, interaksi ekonomi terus berjalan. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara tetangganya di ASEAN, para pekerja di bidang perbankan harus dapat terhubung secara online dengan klien mereka untuk mendiskusikan peluang dan menjalankan bisnis sehari-hari. Karenanya, tingkat literasi digital yang rendah akan menghambat aksesibilitas layanan perbankan.

Walaupun COVID-19 melumpuhkan banyak aktivitas, salah satu sisi baiknya adalah bahwa banyak program pelatihan yang beralih menjadi virtual sehingga calon siswa dapat meningkatkan literasi keuangan mereka. Selain itu, ada peluang bagi golongan minoritas yang selama ini tidak mendapatkan akses atas program keahlian tertentu menjadi memiliki akses ke kursus virtual ini. Maka itu, kebutuhan untuk mengadvokasi literasi digital di Indonesia sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang industri perbankan Indonesia.

Setelah berhasil mengelola rekening dalam negeri, bank-bank Indonesia harus fokus untuk menarik pelanggan eksternal ASEAN. Ada kemungkinan bank regional dan khusus akan berjuang untuk bersaing dengan bank internasional yang berbasis di Indonesia yang menawarkan suku bunga dan pinjaman yang lebih menguntungkan. Kondisi ini dapat menyebabkan penutupan cabang komunitas dan nasabah perbankan dimanfaatkan oleh syarat dan ketentuan yang kurang dipahami. Otoritas perbankan dan jasa keuangan harus melindungi dan menstabilkan suku bunga bank-bank besar di Indonesia, terutama bank-bank yang mengkhususkan diri dalam pinjaman pertanian dan juga usaha mikro kecil menengah



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

(UMKM) untuk melindungi masyarakat petani serta UMKM. Perekonomian Indonesia telah menarik puluhan juta orang keluar dari kemiskinan dalam dua puluh tahun terakhir dan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu mendatang. Ada peluang besar yang dicerminkan dengan tantangan yang signifikan. Masalah ini dapat diatasi dengan mendukung literasi digital dan pendidikan profesional keuangan muda.

Artikel ini ditulis oleh Pia Dunlop, mahasiswa J.D. University of New South Wales dalam program Kerjasama magang PSHK dengan ACICIS.